

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Laporan ini menyajikan informasi terkait tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2014.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Rencana Strategis BKPM Tahun 2010-2014.

Fungsi Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari KKN. Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan sebagai alat penilai kinerja setiap tahun dan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*stakeholders*). Di samping itu, Laporan Kinerja merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BKPM.

Dalam pelaksanaan kegiatan BKPM diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala BKPM maupun jajaran Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Tahun 2014.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis secara umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, terutama capaian kinerja yang mendukung prioritas nasional iklim investasi dan iklim usaha yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 yang menjadi wewenang BKPM sebagaimana tercermin dari hasil survei *Ease of Doing Business* oleh IFC/*World Bank* yang terus menunjukkan lompatan peningkatan yang cukup signifikan. Di samping itu membaiknya iklim investasi ditunjukkan pula dengan meningkatnya realisasi investasi Tahun 2010 – 2014, baik PMDN maupun PMA.

Hasil penilaian yang terdapat dalam Laporan Kinerja Tahun 2014 ini diharapkan menjadi dasar perbaikan kinerja BKPM di Tahun mendatang. BKPM selanjutnya akan fokus pada berbagai upaya untuk memperoleh hasil yang cepat (*quick wins*) yang dapat membuka pintu bagi investasi swasta yang bernilai besar serta membangun pondasi guna menciptakan iklim investasi di Indonesia yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, 18 Maret 2015
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Franky Sibarani



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja BKPM Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagai perwujudan *good governance* dan kebijakan yang transparan. Selain itu Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengembangan investasi akan difokuskan pada peningkatan investasi melalui peningkatan kapasitas hukum, kemudahan berusaha, perluasan investasi, database investasi, peningkatan daya saing investasi dan perluasan investasi di perusahaan nasional di kawasan ASEAN. Di samping itu, BKPM berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan investasi seperti melakukan perundingan, mengikuti *training/workshop*, melakukan promosi untuk peningkatan investasi, melakukan sosialisasi komitmen dan peluang investasi kepada aparatur pemerintah pusat dan daerah, asosiasi, pelaku usaha, akademisi dan kalangan lainnya.

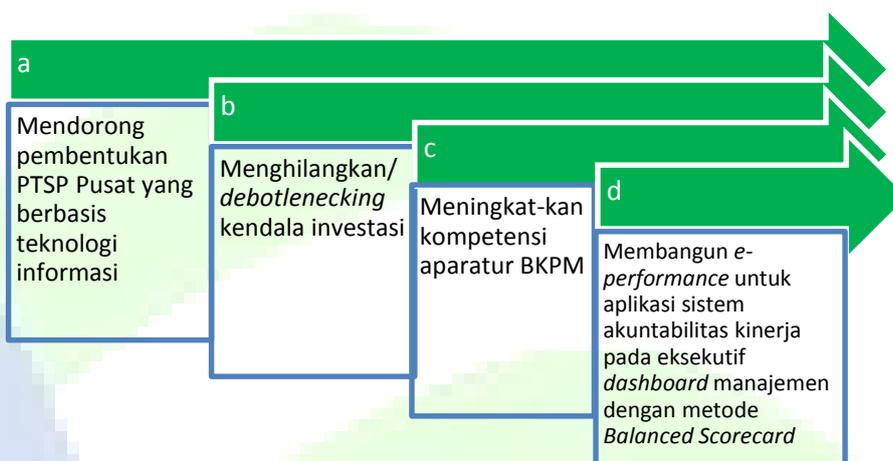
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, BKPM telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan investasi melalui penyelenggaraan fungsi koordinasi penanaman modal di tingkat pusat oleh PTSP Pusat, di tingkat Provinsi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota, di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) oleh Badan Pengusahaan KPBPB, dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh administrator KEK. Dalam mewujudkan penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama, adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan kedua, adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.

Secara umum tingkat capaian kinerja BKPM pada Tahun 2014 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dari 7 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja utama, seluruhnya mencapai kategori "Sangat Baik".

Capaian kinerja BKPM Tahun 2014 dalam mendukung terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha di Indonesia sesuai RPJMN 2010-2014, antara lain :

1. Capaian target nilai realisasi penanaman modal yaitu sebesar Rp 463,1 triliun atau 101,4% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 456,6 triliun, yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp 156,13 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp 307,02 triliun;
2. Capaian kinerja nilai realisasi penanaman modal di luar Jawa mencapai 109,4% dari target Rp 182,6 triliun yaitu Rp 199,8 triliun. Hal ini cukup menggembirakan karena memberikan gambaran bahwa upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi di Luar Jawa menunjukkan hasil yang positif;
3. Hasil survei kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan peringkat 120 atau 91,6% dari target yang ditetapkan peringkat 100-110;
4. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan sebesar 3,43 dari skala Likert 4 atau 115,0% dari target.
5. Dalam rangka meningkatkan kinerja BKPM Tahun 2015-2019, beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan dalam jangka pendek antara lain :

Gambar 1. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja BKPM



6. Sebagai tindak lanjut ke depan arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar pertama penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih

berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

7. Keberhasilan BKPM dalam tata kelola kelembagaan pada Tahun 2014 dalam hal pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai 62,7 kategori “B” dengan perbaikan. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan semangat perubahan seluruh pegawai aparatur sipil negara BKPM dalam mewujudkan reformasi birokrasi di BKPM.

Keberhasilan lainnya yang diperoleh adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013; survei integritas KPK Tingkat Pusat berturut-turut Tahun 2010 peringkat 2, Tahun 2011 peringkat 1, Tahun 2012 peringkat 3, Tahun 2013 peringkat 4, dan Tahun 2014 peringkat 2; survei Ombudsman mengenai kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sarana dan prasarana tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2014 memperoleh peringkat pertama; penghargaan *e-Transparency Award* 2014 meraih peringkat keenam situs terbaik dari 47 Kementerian/Lembaga yang dinilai; penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001-2008 “*Quality Management System Requirement*” di bidang Pelayanan Publik dari lembaga akreditasi Sucofindo International Certification Services yang berlaku sampai dengan Tahun 2015.

8. Pagu Anggaran BKPM pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 574.236.381.000,- (lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 523.386.693.167,- (lima ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau mencapai 91,14%. Capaian tersebut karena adanya penghematan yang berasal dari proses pengadaan barang dan jasa dan penghematan pelaksanaan program kegiatan dengan tidak mengurangi *outcome* capaian kinerja.

Lampiran:
Pencapaian Sasaran Strategis
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun 2014

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	456,6 triliun	463,1 triliun	101,4	Sangat Baik
		2. Nilai realisasi penanaman modal di luar Jawa	182,6 triliun (40%)	199,8 triliun (43,1%)	109,4	Sangat Baik
2.	Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran	Jumlah minat investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan (MII, TTI, GPID, SNI, Pameran, Kunjungan/Misi Investasi, IIPC)	12.100 Minat investasi	12.136 Minat investasi	100,3	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan penanaman modal	3 dari skala 4	3,43	115,0	Sangat Baik
4.	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional	Perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia	Ranking 100-110	Ranking 120	91,6	Sangat Baik
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah	Jumlah daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan penanaman modal (Renstra/RUPMP/RUPM K) sampai dengan Tahun 2014	20 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	22 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	110	Sangat Baik
6.	Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal	persentase kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan	78% dari 144 kesepakatan/perjanjian/perundingan	78%	100	Sangat Baik
7.	Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan	1.Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tercapai	Sangat Baik
		1. Kategori Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	B+	B+	Tercapai	Sangat Baik

Jumlah Anggaran Tahun 2013	Rp. 574.236.381.000	(100,00 %)
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013	Rp. 523.386.693.167	(91,14 %)
Sisa Anggaran	Rp. 50.849.687.833	(8,86 %)